

DINAS KESEHATAN

Kabupaten Cirebon

LAPORAN KINERJA 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi uraian Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan kepada Bupati Cirebon.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini. Saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk meningkatkan kualitas LKIP di tahun yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat berguna bagi semua pihak.

Sumber, 4 Februari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. Neneng Hasanah, MM
Nip. 19730323 200312 2 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap program dan kegiatan seperti yang diuraikan pada Bab III, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021. Dari 5 program, 21 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan, dengan 1 tujuan, 10 sasaran dan 11 indikator diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sebanyak 5 IK (45,45%) capaiannya sangat baik
2. Sebanyak 4 IK (36,36) capaiannya baik
3. Sebanyak 1 IK (9,09%) capaiannya cukup baik
4. Sebanyak 1 IK (9,09%) capaiannya tidak baik

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2021 yang berlandaskan pada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 601.888.529.114,- dengan realisasi sebesar Rp. 506.616.926.026,- atau 84,17%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 95.271.603.088,-. Belanja tersebut terbagi menjadi dua yaitu belanja Operasi sebesar Rp. 577.722.074.473,00 dengan realisasi sebesar Rp. 487.863.581.429,00 atau 84,45%, dan belanja Modal sebesar Rp. 24.166.454.641,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.753.344.597,00 atau 77,60% yang merupakan penunjang utama untuk pelaksanaan program. Serapan anggaran belanja ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020 yang hanya mencapai 83,54%.

Adanya Pandemi COVID 2019 membuat banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan, hal itu berpengaruh terhadap capaian kinerja maupun realisasi anggaran

Selanjutnya, untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, maka sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara

berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam bentuk memberikan masukan tentang tingkat pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 kami buat, tentunya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini semata karena keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini. Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan pendidikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	IV
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Isu Strategis Yang Berpengaruh	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Tujuan dan Sasaran	7
B. IKU Dinas Kesehatan	8
C. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan	9
D. Kriteria Pencapaian Indikator	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	15
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja	15
C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	40
BAB IV PENUTUP	45

**BAB I
PENDAHULUAN****A. GAMBARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dimana Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun sumber dana Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, APBD Propinsi, DAK/APBN Tahun anggaran 2021.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari program atau kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini menggambarkan indikator kinerja output atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Tugas Kepala Dinas Kesehatan, yaitu mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Dinas meliputi urusan kesekretariatan, merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program

dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

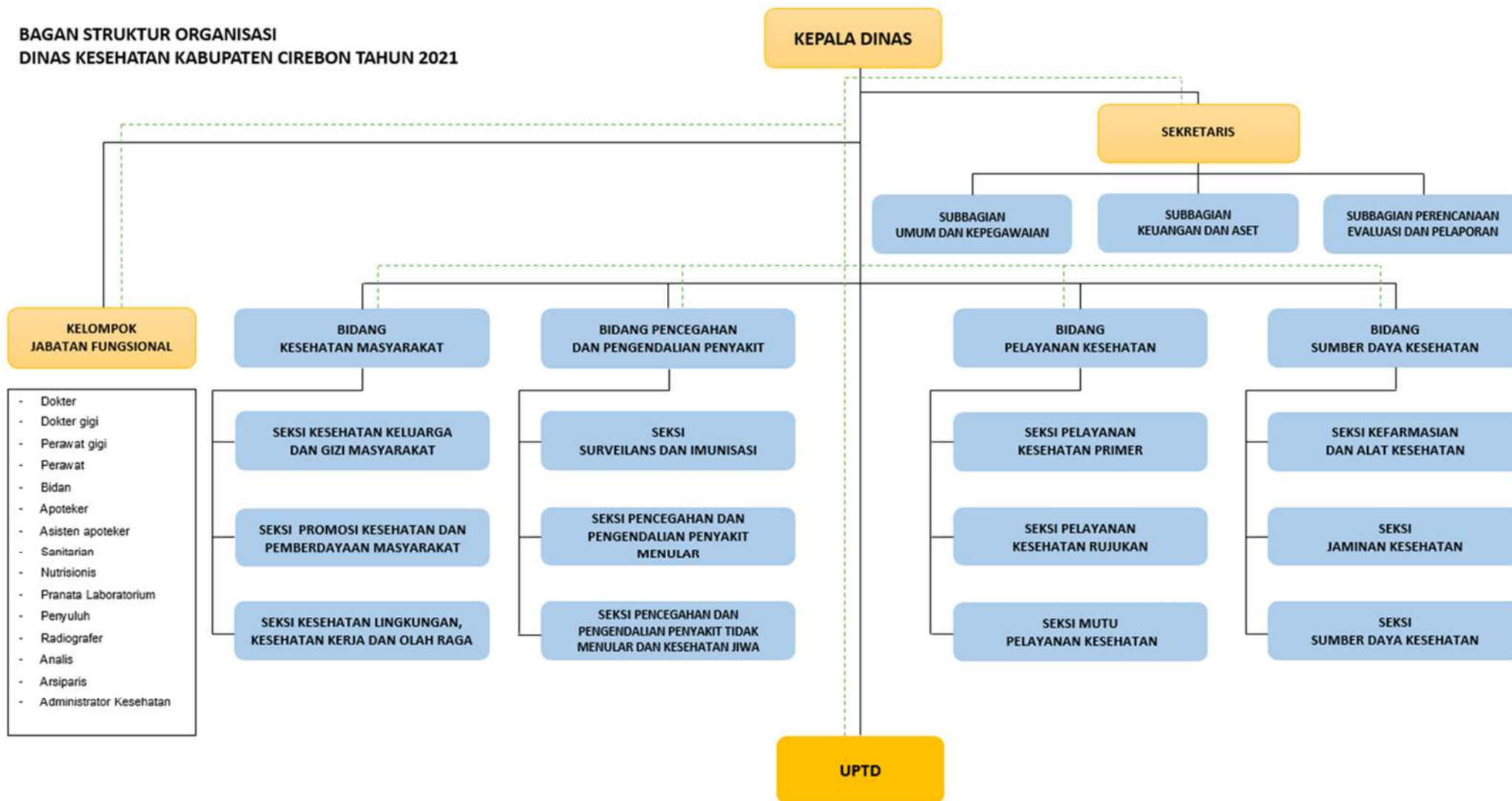
- a) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang kesehatan dan Puskesmas.
- b) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan dan Puskesmas.
- c) Perencanaan, pembinaan dan pendayagunaan tenaga pelayanan kesehatan.
- d) Perencanaan dan pengendalian anggaran.
- e) Pengendalian urusan administrasi Dinas.
- f) Pengendalian dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan penunjang.
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang pelayanan kesehatan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- h) Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang urusan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ruang lingkup tugas.
- i) Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) bidang Kesehatan dan Puskesmas.
- j) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Bab III Bagian Kedua tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pasal 5 disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**



Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 3) Seksi SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada bidang kesehatan di kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan sistem kesehatan di wilayahnya serta pelaksanaan program kesehatan termasuk dalam menentukan struktur organisasinya. Dengan beban tanggung jawab tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon perlu menyusun perencanaan strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di FKTP dan rujukan pada FKRTL.

2. Percepatan dan perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Peningkatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
4. Penguatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui Germas.
5. Peningkatan penyehatan lingkungan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
6. Pelayanan dan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK).

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 untuk urusan wajib bidang kesehatan menitikberatkan kepada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terutama bagi keluarga tidak mampu, perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan, peningkatan dan pemerataan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis Yang Mempengaruhi
- E. Sistematika Penulisan

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. IKU Dinas Kesehatan
- C. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan
- D. Kriteria Pencapaian Indikator

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
- B. Pengukuran dan Analisis Kinerja
- C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019-2024 yaitu : **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, dengan **Indeks Keluarga Sehat (IKS)** sebagai indikatornya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu : 1) penerapan paradigma sehat, 2) penguatan pelayanan kesehatan, dan 3) pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan *continuum of care (CoC)* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (*benefit*), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. Target pencapaian indikator IKS di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021 adalah : 0,25 atau 25% dan meningkat menjadi 0,40 atau 40% pada Tahun 2024.

Sasaran

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Dinas Kesehatan memiliki 10 (sepuluh) sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon pada periode Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Sasaran 1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), dengan indikator sasaran :

- o Angka Kematian Ibu dari 83,5 per 100.000 KH pada Tahun 2021 menjadi 79,0 per 100.000 KH pada Tahun 2024.

Sasaran 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dengan indikator sasaran :

- Angka Kematian Bayi dari 3,78 per 1.000 KH pada Tahun 2021 menjadi 3,69 per 1000 KH pada Tahun 2024.

Sasaran 3. Meningkatnya status gizi Balita, dengan indikator sasaran :

- Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan mencapai 85 setiap tahunnya.

Sasaran 4. Meningkatnya Status Gizi ibu hamil, dengan indikator sasaran :

- Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan mencapai 80 setiap tahunnya.

Sasaran 5. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator sasaran :

- Persentase UCI Desa dari 90,5 pada Tahun 2021 menjadi 98 pada Tahun 2024.

Sasaran 6. Meningkatnya PHBS Rumah Tangga, dengan indikator :

- Persentase Rumah Tangga berPHBS dari 69 pada Tahun 2021 menjadi 75 pada Tahun 2024.

Sasaran 7. Meningkatnya Persentase Desa ODF (*Open Defecation Free*), dengan indikator sasaran :

- Persentase Desa ODF dari 49,76 pada Tahun 2021 menjadi 67,45 pada Tahun 2024.

Sasaran 8. Ketersediaan obat esensial di Puskesmas, dengan indikator sasaran :

- Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial mencapai ≥ 95 setiap tahunnya.

Sasaran 9. Tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC), dengan indikator sasaran :

- Persentase UHC dari 97,5 pada Tahun 2021 menjadi 99,0 pada Tahun 2024.

Sasaran 10. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan, dengan indikator sasaran :

- Indeks Kepuasan Masyarakat dari 3,32 pada Tahun 2021 menjadi 3,53 pada Tahun 2024.

B. IKU DINAS KESEHATAN

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Cirebon ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam indikator kesehatan, indikator kinerja kunci, standar pelayanan minimal, indikator RPJMD dan indikator lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS)		Indeks Keluarga Sehat (IKS)
	1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu
	2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi
	3. Meningkatnya Status Gizi Balita	Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan
	4. Meningkatnya Status Gizi ibu hamil	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan
	5. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase UCI Desa
	6. Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS
	7. Meningkatnya jumlah Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	Persentase Desa ODF
	8. Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
	9. Tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Persentase UHC
	10. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat

C. PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021.

Berikut ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2021 beserta lampirannya.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	5	6
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	poin	0,25
1	Menurunnya Angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	83,5
2	Menurunnya Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian bayi	/1.000 KH	3,78
3	Meningkatnya Status Gizi Balita	Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	persen	85
4	Meningkatnya Status Gizi ibu hamil	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	persen	80
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase UCI Desa	persen	90,5
6	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	persen	69
7	Meningkatnya jumlah Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	Persentase Desa ODF	persen	49,76
8	Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	persen	≥ 95
9	Tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Persentase UHC	persen	97,5
10	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,32

Sesuai dengan DPA perubahan Tahun 2021, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021, tercantum dalam belanja urusan (belanja program/ kegiatan/ sub kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 438.568.025.814,00. Berikut rincian belanja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021.

Tabel 2.3
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	BELANJA URUSAN	438.568.025.814
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	437.305.212.544
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21.062.389.520
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.540.959.720
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	576.570.000
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.745.000.000
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.842.008.000
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	6.318.823.459
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.860.002.341
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	179.026.000
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	415.924.067.724
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	315.347.600
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	185.349.600
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	184.411.900
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	154.167.500
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	368.717.600
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	223.735.500
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	167.182.000
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	189.331.700
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	189.349.440
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	161.080.600
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	229.318.100
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	950.289.000
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.096.400.000
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.962.766.100
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	59.748.340
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	496.691.000
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	96.599.900
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	41.830.000
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	399.997.340
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	26.085.900
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	510.550.000
02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	620.920.000
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.538.344.230
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	121.207.428.520

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	38.860.400
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	26.987.200
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	240.749.980
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	157.389.168.670
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	22.145.192.622
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3.754.756.000
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	38.024.500
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	98.114.686.482
02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	800.000.000
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	211.989.700
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	90.000.000
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45.000.000
02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	76.989.700
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.765.600
02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	10.000.000
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	49.999.900
02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	46.765.700
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	339.412.800
03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	69.996.200
03.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	69.996.200
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	269.416.600
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	49.416.800
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	219.999.800
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	197.028.100
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	117.028.800
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	71.029.900
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.999.000
04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30.999.900

04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	35.000.000
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	35.000.000
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35.000.000
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35.000.000
04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.999.300
04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.999.300
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	726.372.370
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	358.094.600
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	358.094.600
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	248.549.870
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	248.549.870
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.727.900
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	119.727.900

D. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya DALAM % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian target indikator
Sangat baik	≥ 100%
Baik	80% - < 100%
Cukup baik	60% - 80%
Kurang Baik	50% - 60%
Tidak Baik	< 50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun pemerintah. Pada tahun 2021 telah dilakukan survei kepuasan terhadap semua pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di semua UPTD Puskesmas se Kabupaten Cirebon, dengan nilai 3,30. Itu merupakan kriteria nilai yang baik atas pencapaian seberapa jauh kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas.

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Pencapaian Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan untuk Tahun 2021 merupakan tahun pertama pada Renstra Periode 2019-2024 belum seluruhnya dapat dilaksanakan, oleh karena itu persentase tingkat pencapaiannya belum maksimal. Ikhtisar pencapaian sasaran Tahun 2021 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Uraian	Indikator Kinerja Outcome	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kriteria
1	2	3	4	8	9	10
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,25	0,22	88,00	Baik
1.	Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	83,50	112,21	-74,01	Tidak Baik
2.	Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi	3,78	2,24	101,60	Sangat baik
3	Meningkatnya Status Gizi Balita	Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan	85,00	70,13	82,51	Baik

		tambahan				
4.	Meningkatnya Status Gizi ibu hamil	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	80,00	83,83	104,79	Sangat baik
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase UCI Desa	90,50	66,98	74,01	Cukup baik
6.	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	69,00	69,71	101,03	Sangat baik
7.	Meningkatnya Persentase Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	Persentase Desa ODF	50	70,05	140,77	Sangat baik
8.	Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	95,00	100,00	105,26	Sangat baik
9.	Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)	Persentase UHC	97,50	91,66	94,01	Baik
10.	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,32	99,40	99,40	Baik

Pada Tahun 2021 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran dengan menggunakan 11 indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 5 IK (45,45%) capaiannya sangat baik
2. Sebanyak 4 IK (36,36) capaiannya baik
3. Sebanyak 1 IK (9,09%) capaiannya cukup baik
4. Sebanyak 1 IK (9,09%) capaiannya tidak baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)

No	Tujuan		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase	
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,20	0,25	562.839	121.941	0,22	88,00	0,40

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator tujuan Dinas Kesehatan yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebesar 0,25. Capaian IKS pada Tahun 2021 sebesar 0,22, dengan rincian jumlah keluarga sehat yang diperoleh sebanyak 121.941 keluarga, dari total keluarga yang didata sebanyak 562.839 keluarga. Dengan demikian persentase capaian indikator tujuan tersebut sebesar 88,00 dengan kategori baik.

Apabila kita membandingkan IKS pada Tahun 2021 sebesar 0,22 terhadap Tahun 2020 (0,20), maka ada peningkatan IKS sebesar 0,2 poin. Akan tetapi bila kita bandingkan nilai persentase capaian sasaran antara Tahun 2021 (88,00%) dengan Tahun 2020 (95,46%) mengalami penurunan sebesar 7,46%. Selain belum mencapai target Tahun 2021, persentase capaian IKS pada Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan pada Tahun 2020, hal itu disebabkan karena pada Tahun 2021 pendataan yang dilaporkan melalui input pada aplikasi Keluarga Sehat baru 86,71 % dari total sasaran yang ada jadi belum semua hasil pendataan itu bisa diinput pada aplikasi. Saat ini Puskesmas sudah sampai pada tahap intervensi, meskipun ada beberapa Puskesmas yang masih melaksanakan input data keluarga.

Target capaian IKS pada Tahun 2021 sebesar 0,25 telah disinkronkan dengan target Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada tahun terakhir Renstra Perubahan sebesar 0,40.

Pencapaian Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase	
1	Menurunnya Angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	84,16/100.000 KH	85/100.000 KH	46.341	52	112.21/100.000 KH	- 74.01	79

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 85 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Capaian angka kematian ibu pada Tahun 2021 sebesar 112,21 per 100.000 KH, dengan rincian jumlah kematian ibu yang ditemukan sebanyak 52 kasus, dari total kelahiran hidup sebanyak 46.341 bayi. Untuk indikator ini yang diharapkan adalah adanya penurunan angka pencapaiannya, semakin menurun semakin baik, sementara dari hasil yang didapat memperlihatkan angka tersebut semakin meningkat, sehingga persentase capaian indikator sasaran tersebut sebesar - 71,01% dengan kategori tidak baik.

Apabila kita membandingkan capaian kematian ibu pada Tahun 2021 sebesar 112,21 per 100.000 KH terhadap Tahun 2020 (84,16 per 100.000 KH), maka ada peningkatan capaian yang sangat tinggi sebesar 28.05 poin. Dilihat dari jumlah kematian ibu juga ada peningkatan pada Tahun 2021 sebanyak 52 kematian dan Tahun 2020 sebanyak 40 kematian.

Masa pandemi memberikan dampak negatif terhadap pelayanan Kesehatan keluarga dan Gizi, sehingga cakupan program menurun dan jumlah kematian Ibu mengalami peningkatan.

Adanya peningkatan kematian ibu disebabkan karena :

- Masih tingginya kasus resiko ibu hamil yang dapat meningkatkan resiko kematian
- Masih adanya faktor 3T (Terlambat mengenal tanda bahaya, Terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan ,Terlambat mendapat pertolongan pelayanan kesehatan).
- Kualitas pelayanan ANC dan perawatan masa nifas dengan resiko tinggi kurang optimal (kepatuhan nakes terhadap pelayanan sesuai standar masih kurang)

- d. Adanya kendala dalam sistem rujukan maternal untuk kasus-kasus kegawatdaruratan.
- e. Tingginya jumlah ibu hamil yang terkonfirmasi covid (ibu hamil lebih rentan terjadinya infeksi).

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Mengoptimalkan kegiatan Audit Maternal Perinatal dan Supervisi Fasilitatif oleh SPOG dan SPA.
- b. Koordinasi dengan Rumah Sakit dalam pelayanan isolasi bagi ibu hamil terkonfirmasi covid-19 yang membutuhkan perawatan rujukan.
- c. Mengoptimalkan Supervisi Fasilitatif dari Bidan Koordinator ke Bidan di Desa.
- d. Penguatan pelayanan KIA bagi BPM.
- e. Meningkatkan monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas.

Capaian angka kematian ibu pada Tahun 2021 masih sangat tinggi, masih diatas target Tahun 2021 yang sebesar 85/100.000 KH. Dan bila disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 sebesar 79/100.000 KH. Capaian angka kematian ibu Tahun 2021 masih jauh dari target akhir tahun Renstra.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 14 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 315.347.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 313.847.600,- sisa sebesar Rp. 1.500.000,- atau tercapai sebesar 99,52%. Output sub kegiatan ini sebanyak 47.535 Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal sesuai standar (K4) dari target 50.296 bumil.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 185.349.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.627.100,- sisa sebesar Rp. 1.722.500,- atau tercapai sebesar 99,07%. Output sub kegiatan ini ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar (PF) sebanyak 45.944 ibu dari target sebanyak 47.827 ibu.
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.096.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.095.280.000,- sisa sebesar Rp. 1.120.000,- atau tercapai sebesar 99,95%. Dengan output sub kegiatan ini terbentuknya pos kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan

pada situasi khusus sebanyak 42 Pos (bencana 20 pos, lebaran 16 pos dan natal & tahun baru 7 pos) dari target 40 Pos.

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.830.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 36 Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan tradisional dari target 36 Puskesmas (100%).
5. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 509.939.570,- sisa sebesar Rp. 610.430,- atau tercapai sebesar 99,88%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 220.095 KK diintervensi PIS-PK dari target 150.685 KK, jumlah KK mandiri sebanyak 6.618 KK dari target 6.600 KK, kunjungan rawat jalan gigi sebanyak 458.163 kunjungan dari target 91.880, sebanyak 175 mata yang dioperasi katarak dari target 350 mata, kunjungan laboratorium Puskesmas sebanyak 388.427 kunjungan dari target 224.572.
6. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 620.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 597.636.948,- sisa sebesar Rp. 23.283.052,- atau tercapai sebesar 96,25%. Dengan output sub kegiatan ini kasus gawat darurat yang dilayani PSC 119 sebanyak 6.714 kasus.
7. Operasional Pelayanan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 157.389.168.670,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.851.312.176,- sisa sebesar Rp. 41.537.856.494,- atau tercapai sebesar 73,60%. Dengan output sub kegiatan ini Puskesmas yang memanfaatkan dana BOK Puskesmas sebanyak 60 Puskesmas.
8. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.145.192.622,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.817.366.242,- sisa sebesar Rp. 3.327.826.380,- atau tercapai sebesar 84,97%. Dengan output sub kegiatan ini UPTD yang menerima biaya operasional, ada 1 (satu) yaitu Labkesda.
9. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.754.756.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.790.509.500,- sisa sebesar Rp. 1.964.246.500,- atau tercapai sebesar 47,69%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 60 Puskesmas terakreditasi,

- 11 RS terakreditasi, ada 1 (satu) laboratorium yang terakreditasi (laboratorium kesehatan daerah).
10. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 800.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 794.000.000,- sisa sebesar Rp. 6.000.000,- atau tercapai sebesar 99,25%. Dengan output sub kegiatan layanan PSC 119 (Gawat darurat/ evakuasi rujukan, Fasilitas rujukan call center dan layanan Lainnya) sebanyak 6.714 kasus.
 11. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.750.000,- sisa sebesar Rp. 2.250.000,- atau tercapai sebesar 77,50%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 8 RS & fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan pengawasan dan pengendalian.
 12. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.449.900,- sisa sebesar Rp. 3.550.000,- atau tercapai sebesar 92,90%. Dengan output sub kegiatan ini Puskesmas terverifikasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebanyak 60 Puskesmas dari target 60 Puskesmas.
 13. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.765.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.765.700,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan antara Dinas Kesehatan dengan RS di Kabupaten Cirebon sebanyak 12 rumah sakit.
 14. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.996.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.996.200,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini Jumlah SIP yang diterbitkan sebanyak 2.291 SIP dari target 1500 SIP.

Pencapaian Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase	
2	Menurunnya Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	2,82/1000 KH	3,78/1000 KH	46.341	104	2,24/1000 KH	101,60	3,69

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3,78/1000 Kelahiran Hidup (KH). Capaian angka kematian bayi pada Tahun 2021 sebesar 2,24/1.000 KH, dengan rincian jumlah jumlah kematian bayi yang ditemukan sebanyak 104 kasus, dari total kelahiran hidup sebanyak 46.341 bayi, Dengan demikian persentase capaian indikator sasaran tersebut sebesar 101,60 dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian angka kematian bayi pada Tahun 2021 sebesar 2,24 per 1.000 KH terhadap Tahun 2020 (2,82 per 1.000 KH), maka ada penurunan angka kematian bayi sebesar 0,58 poin. Jika membandingkan nilai persentase capaian sasaran antara Tahun 2021 (101,60%) dengan Tahun 2020 (101,03%) mengalami penurunan sebesar 0,57%.

Penurunan angka tersebut selain karena pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penanganan ibu bersalin yang baik didukung juga dengan adanya Tim penanggulangan komplikasi kebidanan dan bayi tingkat Puskesmas, kecamatan dan Kabupaten sudah berjalan, sehingga dapat membantu didalam penjangkaran kasus komplikasi neo dan bayi dan sudah optimalnya Pelayanan neonatal menggunakan pendekatan MTBM, salah satunya melalui kegiatan Kalakarya MTBM/MTBS di tingkat Puskesmas.

Target capaian angka kematian bayi pada Tahun 2021 sebesar 2,24/1.000 KH telah disinkronkan dengan target Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada akhir Renstra sebesar 3,69/1.000 KH. Capaian angka kematian bayi Tahun 2021 sebesar 2,24/1.000 KH telah melampaui target akhir tahun Renstra yaitu sebesar 3,69/1.000 KH. Apabila kita menghitung nilai persentase capaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut, nilai pencapaiannya telah melebihi 100%.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 184.411.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 184.411.900,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini adalah jumlah Bayi Baru Lahir (BBL) mendapatkan pelayanan BBL sesuai standar Kunjungan Neonatal Lengkap (KN) sebanyak 46.298 bayi dari target 47.394 bayi.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 154.167.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.643.600,- sisa sebesar Rp 13.523.900,- atau tercapai sebesar 91,23%. Output sub kegiatan ini jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita (0-59 bln) sesuai standar sebanyak 146.251 balita dari target 173.110 balita.
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 368.717.600,- dan terealisasi sebesar Rp 257.238.900,- sisa sebesar Rp. 111.478.700,- atau tercapai sebesar 69,77%. Dengan output sub kegiatan anak usia pendidikan dasar (kelas 1 s/d 9) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 272.940 anak dari target 331.645 anak.

Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Status Gizi Balita

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
3	Meningkatnya Status Gizi Balita	Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	%		85.00	7.406	5.194	70,13	82,51	85.00

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85%. Capaian Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan pada Tahun 2021 sebesar 70,13%, dengan rincian jumlah Jumlah balita (0-59 bln) dengan kategori status gizi kurang (BB/TB) yang mendapat PMT sebanyak 5.194 balita, dari total balita gizi kurang sebanyak 7.406 balita. Dengan demikian capaian persentase indikator sasaran tersebut 82,51% dengan kategori baik.

Apabila kita membandingkan capaian persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan pada Tahun 2021 sebesar 70,13% terhadap Tahun 2020 (60,45%), maka ada peningkatan sebesar 9,68%.

Target capaian Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan pada Tahun 2021 sebesar 85% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan (2019-2024) sebesar 85%. Dengan demikian capaian sasaran indikator ini pada Tahun 2021 memiliki nilai capaian sasaran yang lebih kecil (70,13%) dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra pada Tahun 2024.

Selain ketersediaan makanan tambahan dari anggaran APBN, BOK dan APBD sangat terbatas, dampak pandemik pun menjadi kendala dalam pendistribusian PMT balita gizi kurang tersebut. Walaupun sudah dilakukan beberapa upaya seperti janji temu dan kunjungan rumah namun hasilnya masih belum optimal.

Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Status Gizi Ibu Hamil

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
4	Meningkatnya Status Gizi ibu hamil	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	%	63,16	80.00	3.594	3.013	83,83	104,79	80.00

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80%. Capaian Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan pada Tahun 2021 sebesar 83,83%, dengan rincian jumlah Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT sebanyak 3.013 kasus, dari total ibu hamil KEK sebanyak 3.594 ibu hamil. Dengan demikian capaian persentase indikator sasaran tersebut sebesar 104,79% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan pada Tahun 2021 sebesar 83,83% terhadap Tahun 2020 (63,16%), maka ada peningkatan yang cukup tinggi sebesar 20,67%, dan bila dibandingkan dengan target pada Tahun 2021 sudah melampaui target (80%).

Pemberian PMT ini dilakukan dengan anggaran dari berbagai sumber dana seperti APBN, BOK dan APBD.

Target capaian Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan Tahun 2021 sebesar 83,83% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan (2019-2024) sebesar 80%. Dengan demikian capaian sasaran indikator ini pada Tahun 2021 memiliki nilai capaian sasaran yang sudah melampaui dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra pada Tahun 2024. Hanya ada 1 Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran 3 dan 4, yaitu :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp 2.962.766.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.616.956.650,- sisa sebesar Rp. 345.809.450,- atau tercapai sebesar 88,33%. Dengan output sub kegiatan ini ditemukan balita Berat Badan Kurang sebanyak 7.406 balita, dan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebanyak 378 balita.

Pencapaian Sasaran 5 : Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase	
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase UCI Desa	%	69.58	90.5	424	284	66,98	74,01	98

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 90,50%. Capaian UCI Desa pada Tahun 2021 sebesar 66,98%, dengan rincian jumlah desa yang mencapai UCI sebanyak 284 desa/kelurahan, dari total jumlah desa/kelurahan sebanyak 424 desa/kelurahan. Dengan demikian capaian persentase indikator sasaran tersebut di atas sebesar 74,01% dengan kategori cukup baik.

Apabila kita membandingkan capaian UCI Desa pada Tahun 2021 sebesar 66,98% terhadap Tahun 2020 (69,58%), maka ada penurunan sebesar 2,60%. Jika membandingkan nilai persentase capaian antara Tahun 2021 (74,01%) dengan Tahun 2020 (79,97%) mengalami penurunan sebesar 5,96%.

Target capaian UCI Desa pada Tahun 2021 sebesar 90,50% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan (2019-2024)

sebesar 98%. Dengan demikian capaian sasaran indikator ini pada Tahun 2021 masih jauh dari target akhir Renstra Perubahan pada Tahun 2024.

Adanya pandemi COVID-19 pada Tahun 2021 membuat banyak kebijakan dan aturan dalam pelayanan imunisasi menjadi tidak maksimal, sementara pelayanan imunisasi sangat bergantung pada keberadaan pelayanan di Posyandu dan di sekolah, pemerintah membatasi kegiatan Posyandu dan sekolah. Puskesmas hanya untuk melayani masyarakat yang sakit saja, kegiatan belajar mengajar dan tatap muka di berhentikan.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 14 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, alokasi anggaran sebesar Rp 1.538.344.230,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.493.298.480,- sisa sebesar Rp. 45.045.750,- atau tercapai sebesar 97,07%. Dengan output sub kegiatan ini penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebanyak 716 orang, penderita diare yang ditangani sebanyak 29.909 orang, terlaksananya fogging fokus sebanyak 130 fokus, balita pneumonia yang ditangani sebanyak 4.744 kasus, dan penemuan kasus kusta sebanyak 142 kasus/10.000 penduduk.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, alokasi anggaran sebesar Rp 229.318.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.150.100,- sisa sebesar Rp. 13.168.000,- atau tercapai sebesar 94,26%. Dengan output sub kegiatan ini orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar; sebanyak 10.277 orang, penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA sebanyak 1.675 orang, dan sebanyak 3.002 penderita TB yang dinyatakan pengobatan lengkap dan sembuh.
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, alokasi anggaran sebesar Rp 950.289.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 920.312.500,- sisa sebesar Rp. 29.976.500,- atau tercapai sebesar 96,84%. Dengan output sub kegiatan ini Skrining HIV/AIDS pada populasi kunci dan populasi sebanyak 35.722 orang, Jumlah HIV mendapatkan perawatan dan pengobatan HRV sesuai standar sebanyak 176 orang, sebanyak 71 fasilitas kesehatan yang dilakukan setup layanan HIV/AIDS.
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, alokasi anggaran sebesar Rp 161.080.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.008.300,- sisa sebesar Rp. 23.072.300,- atau tercapai sebesar 85,68%.

Dengan output sub kegiatan ini Persentase penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.904 orang.

5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, alokasi anggaran sebesar Rp 189.349.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 189.131.700,- sisa sebesar Rp. 217.740,- atau tercapai sebesar 99,88%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan Penyakit DM sesuai standar sebanyak 18.858 orang.
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, alokasi anggaran sebesar Rp 189.331.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 189.090.100,- sisa sebesar Rp. 241.600,- atau tercapai sebesar 99,87%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan Hipertensi sesuai standar sebanyak 73.173 orang.
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, alokasi anggaran sebesar Rp 167.182.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.693.500,- sisa sebesar Rp. 12.488.500,- atau tercapai sebesar 92,53%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 121.335 orang.
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, alokasi anggaran sebesar Rp 223.735.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 219.083.700,- sisa sebesar Rp. 4.651.800,- atau tercapai sebesar 97,92%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 298.414 orang.
9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 399.997.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 370.869.840,- sisa sebesar Rp. 29.127.500,- atau tercapai sebesar 92,72%. Dengan output sub kegiatan ini terlaksananya Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB) penyakit potensial wabah untuk 1.985 calon jemaah haji, sebanyak 284 desa/kelurahan dengan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai 80%, jumlah murid Sekolah Dasar yang diimunisasi Measles Rubella (MR) sebanyak 28.582 anak, imunisasi Difteri Tetanus (DT) sebanyak 25.035 anak, imunisasi Tetanus difteri (Td) kelas 2 sebanyak 25.167 anak, Imunisasi Td kelas 5 sebanyak 24.628 anak.
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, alokasi anggaran sebesar Rp 26.085.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.165.900,- sisa sebesar Rp. 1.920.000,- atau tercapai sebesar 92,64%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 60 sekolah yang dilakukan skrining Kesehatan jiwa.

11. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah, alokasi anggaran sebesar Rp 38.860.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.340.400,- sisa sebesar Rp. 520.000,- atau tercapai sebesar 98,66%. Dengan output sub kegiatan ini terlaksananya sosialisasi deteksi dini napza (ASSIST) untuk pengelola program Napza di 60 Puskesmas dan pelaksanaan skrining napza di Puskesmas.
12. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional, alokasi anggaran sebesar Rp 26.987.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.406.200,- sisa sebesar Rp. 13.581.000,- atau tercapai sebesar 49,68%. Dengan output sub kegiatan ini sampel yang diambil dan dikirim ke Laboratorium Rujukan sebanyak 45 sampel.
13. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), alokasi anggaran sebesar Rp 38.024.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.737.900,- sisa sebesar Rp. 22.286.600,- atau tercapai sebesar 41,39%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 767 kasus yang dilakukan Investigasi dan penatalaksanaan kasus KIPI dan POM ditangani.
14. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, alokasi anggaran sebesar Rp 98.114.686.482,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.444.698.810,- sisa sebesar Rp. 35.669.987.672,- atau tercapai sebesar 63,64%. Dengan output sub kegiatan ini seluruh kejadian KLB penanganan KLB yang ditangani (1x24 Jam), kelengkapan dan Ketepatan laporan W2 (EWARS) sebanyak 3.120 laporan, ketepatan dan kelengkapan laporan STP sebanyak 709 dan 720 laporan.

Pencapaian Sasaran 6 : Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase	
6	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	66,00	69,00	207.077	144.355	69,71	101,03	75

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 69,00%. Capaian rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2021 sebesar 69,71%, dengan rincian jumlah rumah tangga (RT) yang ber PHBS sebanyak

144.355 RT, dari total RT yang didata/dipantau sebanyak 207.077 RT. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 101,03% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2021 sebesar 69,71% terhadap Tahun 2020 (66,00%), maka ada peningkatan persentase sebesar 0,41%. Jika membandingkan nilai persentase capaian sasaran antara Tahun 2021 (101,03%) dengan Tahun 2020 (98,51%) mengalami peningkatan sebesar 2,52%.

Target capaian rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2021 sebesar 66% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 75%. Bila dilihat dari hasil capaian persentase rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target akhir tahun Renstra.

Perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan semua anggota keluarga agar memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS di tatanan rumah tangga. Sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mampu mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit, mampu melakukan perilaku untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara mandiri serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Adapun indikator PHBS tatanan rumah tangga: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2) Memberi bayi ASI Eksklusif 3) Menimbang bayi dan balita setiap bulan 4) Menggunakan air bersih 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6) Menggunakan jamban sehat 7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 8) Makan buah dan sayur setiap hari 26 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 9) Melakukan Aktivitas Fisik setiap hari 10) Tidak merokok di dalam rumah.

Kenaikan jumlah rumah tangga ber PHBS diantaranya adalah masifnya kampanye cuci tangan pakai sabun dan anjuran mengkonsumsi gizi seimbang dan konsumsi buah dan sayur sebagai upaya untuk mencegah tertular covid-19 dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Dari 10 indikator PHBS rumah tangga yang didata, tidak merokok di dalam rumah merupakan indikator paling rendah capaiannya.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96.599.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.149.900,- sisa sebesar Rp. 450.000,- atau tercapai sebesar 99,53%. Dengan output sub kegiatan ini frekuensi penyuluhan luar gedung oleh Dinas Kesehatan sebanyak 29 kali dalam satu tahun.
2. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 240.749.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.535.980,- sisa sebesar Rp. 5.214.000,- atau tercapai sebesar 97,83%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah kecamatan menyelenggarakan kecamatan sehat sebanyak 28 kecamatan.
3. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 358.094.600,- dan terealisasi sebesar Rp 356.607.600,- sisa sebesar Rp 1.487.000,- atau tercapai sebesar 99,58%. Dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa siaga aktif strata madya sebanyak 296 desa/kelurahan.
4. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 248.549.870,- dan terealisasi sebesar Rp 243.952.400,- sisa sebesar Rp. 4.597.470,- atau tercapai sebesar 98,15%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah Fasilitas kesehatan yang ber PHBS sebanyak 131 fasilitas kesehatan, sebanyak 290 tempat kerja yang melaksanakan PHBS, sebanyak 313 tempat-tempat umum yang melaksanakan PHBS, dan sebanyak 38.433 penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS.
5. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.727.900,- dan terealisasi sebesar Rp 119.664.900,- sisa sebesar Rp. 63.000,- atau tercapai sebesar 99,94%. Dengan output sub kegiatan ini adalah strata Posyandu Aktif sebanyak 1.791 posyandu.

Pencapaian Sasaran 7 : Meningkatnya Persentase Desa ODF (*Open Defecation Free*)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
7	Meningkatnya Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	Persentase Desa ODF	Persen	39,86	50	424	297	70.05	140.77	67.45

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 50% desa ODF. Capaian Desa ODF pada Tahun 2021 sebesar 70,05%, dengan rincian jumlah desa ODF sebanyak 297 desa dari total jumlah desa sebanyak 424 desa/kelurahan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 140,77% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian desa ODF pada Tahun 2021 sebesar 70,05% terhadap Tahun 2020 (39,86%), maka ada peningkatan yang cukup tinggi sebesar 30,19%.

Target capaian desa ODF pada Tahun 2021 sebesar 50% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 67,45%. Bila dilihat dari hasil capaian desa ODF pada Tahun 2021 maka capaian tersebut sudah diatas target akhir tahun Renstra.

Peningkatan capaian desa ODF didukung dengan adanya deklarasi desa ODF secara massal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Bulan April 2021 dan dalam rangka mendukung terwujudnya Cirebon Kabupaten Sehat.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, alokasi anggaran sebesar Rp 496.691.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 495.671.000,- sisa sebesar Rp. 1.020.000,- atau tercapai sebesar 99,79%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 530.671 sarana Sarana Air Bersih yang memenuhi syarat, jamban sehat sebanyak 584.498 sarana, ada 6 (enam) bank sampah yang terbentuk, SD/MI yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 298 sekolah.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, alokasi anggaran sebesar Rp 59.748.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.748.340,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 5

Pos Upaya Kesehatan Kerja yang terbentuk, tidak ada tes kebugaran untuk jemaah haji karena adanya penundaan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021, dan sebanyak 450 siswa SD kelas IV dan V mengikuti tes kebugaran.

3. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, alokasi anggaran sebesar Rp 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah SPP-IRT yang dikeluarkan sebanyak 144 sertifikat.
4. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM), alokasi anggaran sebesar Rp 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.200.000,- sisa sebesar Rp. 2.800.000,- atau tercapai sebesar 92,00%. Dengan output sub kegiatan ini TPM yang memiliki sertifikat laik sehat/laik higiene Sanitasi sebanyak 150 sertifikat.
5. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, alokasi anggaran sebesar Rp 9.999.300,- dan terealisasi sebesar Rp 9.999.300,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini Jumlah tempat makanan jajanan (Kantin sekolah) yang dilakukan pembinaan sebanyak 60 SD/MI.

Pencapaian Sasaran 8 : Ketersediaan obat esensial di Puskesmas

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
8	Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	≥ 95	60	60	100.00	105.26	≥ 95

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar $\geq 95\%$. Capaian ketersediaan obat pada Tahun 2021 sebesar 100,00%, dengan rincian jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebanyak 60 dari total jumlah Puskesmas sebanyak 60 Puskesmas. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 105,26% dengan kategori sangat baik.

Target capaian ketersediaan obat pada Tahun 2021 sebesar 100,00% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar $\geq 95\%$. Bila dilihat dari hasil capaian ketersediaan obat pada Tahun 2021 maka capaian tersebut sudah diatas target akhir tahun Renstra.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 1.842.008.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.646.219.075,- sisa sebesar Rp. 195.788.925,- atau tercapai sebesar 89,37%. Output sub kegiatan ini pengadaan Alat kesehatan di Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sebanyak 61 paket.
2. Pengadaan Obat, Vaksin, alokasi anggaran sebesar Rp 6.318.823.459,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.605.154.752,- sisa sebesar Rp. 1.713.668.707,- atau tercapai sebesar 72,88%. Output sub kegiatan ini pengadaan kebutuhan obat sebanyak 56 item dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar sebanyak 60 Puskesmas.
3. Pengadaan Bahan Habis Pakai, alokasi anggaran sebesar Rp 5.860.002.341,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.617.673.060,- sisa sebesar Rp. 242.329.281,- atau tercapai sebesar 95,86%. Dengan output sub kegiatan ini kebutuhan pengadaan BMHP sebanyak 34 item.
4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 179.026.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 179.026.000,- sisa sebesar Rp. 2.994.600,- atau tercapai sebesar 98,32%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 348 alat kesehatan yang sudah dikalibrasi.
5. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), alokasi anggaran sebesar Rp 71.029.900,- dan terealisasi

sebesar Rp 54.824.363,- sisa sebesar Rp. 16.205.537,- atau tercapai sebesar 77,18%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah sarana kesehatan yang mendapat rekomendasi sebanyak 107 sarana kesehatan, dan yang mendapat pembinaan sebanyak 201 sarana.

6. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), alokasi anggaran sebesar Rp 14.999.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.299.000,- sisa sebesar Rp. 2.700.000,- atau tercapai sebesar 81,99%. Dengan output sub kegiatan ini tersedianya dokumen data perizinan sarana kesehatan sebanyak 1 dokumen.
7. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), alokasi anggaran sebesar Rp 30.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp 29.999.900,- sisa sebesar Rp. 1.000.000,- atau tercapai sebesar 96,77%. Dengan output sub kegiatan ini Jumlah Sarana kesehatan yang mendapat pembinaan sebanyak 201 sarana.

Pencapaian Sasaran 9 : Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
9	Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)	Persentase UHC	Persen	96,29	97,5	2.320.493	2.126.951	91.66	94.01	99.00

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,5%. Capaian Persentase UHC pada Tahun 2021 sebesar 91,66%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 94,01% dengan kategori baik.

Apabila kita membandingkan Capaian Persentase UHC pada Tahun 2021 sebesar 91,66%, terhadap Tahun 2020 (96,29%), maka ada penurunan capaian sebesar 4,63%.

Penurunan UHC disebabkan karena diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021 sehingga berdampak kepada Kepesertaan JKN-

KIS Kabupaten Cirebon sebanyak 139.475 jiwa yang dinon-aktifkan karena meninggal, peserta pindah segmen, kepesertaan ganda dan masalah pada NIK.

Target Capaian Persentase UHC pada Tahun 2021 sebesar 91,66% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 99,00%. Bila dilihat dari hasil capaian Persentase UHC pada Tahun 2021 maka capaian tersebut masih jauh dari target akhir tahun Renstra.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :

2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp 121.207.428.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.373.670.744,- sisa sebesar Rp. 1.833.757.776,- atau tercapai sebesar 98,48%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah penduduk miskin yang dicover sebagai peserta PBI daerah sebanyak 305.152 orang, dan ibu hamil/bersalin/Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Jampersal sebanyak 1.073 kasus.

Pencapaian Sasaran 10 : Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2020	2021					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
10	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,245	3,32	3.32	3.30	99.40	99.40	3.52

Pada Tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3,32. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 sebesar 3,30. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 99,40% dengan kategori baik.

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 sebesar 3,30 terhadap Tahun 2020 (3,25), maka ada peningkatan capaian sebesar 0,05 poin. Jika membandingkan nilai persentase capaian sasaran

antara Tahun 2021 (99,40%) dengan Tahun 2020 (91,41%) juga mengalami peningkatan sebesar 7,99 poin.

Target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 sebesar 3,30 telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 3.52. Bila dilihat dari hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 maka capaian tersebut masih dibawah target akhir tahun Renstra.

Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari adanya penilaian akreditasi Puskesmas, dimana sejak Tahun 2020 sudah semua Puskesmas di Kabupaten Cirebon sudah dilakukan penilaian akreditasi dengan hasil yang bervariasi dari tingkat Dasar hingga Paripurna. Hal itu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas baik dari segi pelayanan maupun dari kenyamanan tempatnya.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini ada 27 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.883.272,- sisa sebesar Rp. 10.116.728,- atau tercapai sebesar 87,35%. Output sub kegiatan ini tersedianya dokumen Renja murni 2021, Renja Perubahan 2021 dan Renstra Perubahan 2019-2024.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp 239.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 238.824.112,- sisa sebesar Rp. 1.105.888,- atau tercapai sebesar 99,53%. Output sub kegiatan ini tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD : sebanyak 4 dokumen yaitu dokumen LPPD/LKPJ 2020, dokumen LAKIP 2020, Laporan Evaluasi Kinerja terhadap Renstra/Renja 2020 dan Laporan Pencapaian SPM 2020).
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.739.700,- sisa sebesar Rp. 260.300,- atau tercapai sebesar 99,35%. Output sub kegiatan ini adanya dokumen laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sebesar Rp 160.980.244.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.013.891.369,- sisa sebesar Rp. 6.966.353.231,- atau tercapai sebesar 95,67%. Output sub kegiatan ini sebanyak 1.499 pegawai ASN telah terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya 1 (satu) dokumen laporan keuangan akhir tahun.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya dokumen 1 (satu) laporan keuangan semester 1/2021.
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp 165.108.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 161.019.469,- sisa sebesar Rp. 4.088.531,- atau tercapai sebesar 97,52%. Output sub kegiatan ini terdapat 12 Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan sosialisasi.
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sebesar Rp 14.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.999.900,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang dibelanjakan sebanyak 13 komponen.
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar Rp 137.397.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.712.180,- sisa sebesar Rp. 3.685.320,- atau tercapai sebesar 97,32%. Output sub kegiatan ini tersedianya alat-alat penunjang kegiatan kantor (komputer, printer, laptop, mesin penghancur kertas, dll) sebanyak 12 unit.
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sebesar Rp 24.997.500,- dan terealisasi sebesar Rp 24.997.500,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini adanya ketersediaan makan minum untuk tamu dan rapat sebanyak 144 kali.
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sebesar Rp 239.505.000,- dan terealisasi sebesar Rp 239.093.537,- sisa sebesar Rp. 411.463,- atau tercapai sebesar 99,83%. Output sub kegiatan ini tersedianya barang cetak dan penggandaan yang dikerjakan dan dibayarkan sebanyak 9 jenis.
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp 69.928.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.928.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya bahan bacaan kantor dan perundang-undangan sebanyak 60 media.
13. Penyediaan Bahan/Material, sebesar Rp 42.908.500,- dan terealisasi sebesar Rp 42.908.500,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub

kegiatan ini tersedianya Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan sebanyak 51 jenis ATK.

14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebesar Rp 131.991.000,- dan terealisasi sebesar Rp 94.048.209,- sisa sebesar Rp. 37.942.791,- atau tercapai sebesar 71,25%. Output sub kegiatan ini orang yang melakukan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 107 orang.
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp 490.658.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 351.265.997,- sisa sebesar Rp. 139.392.403- atau tercapai sebesar 71,59%. Output sub kegiatan ini terbayarnya rekening tagihan komunikasi, air dan listrik sebanyak 19 rekening.
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar Rp 49.841.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.841.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini jasa perbaikan peralatan kerja yang dikerjakan sebanyak 129 unit.
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sebesar Rp 249.958.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.958.400,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang dibayarkan sebanyak 28 unit kendaraan.
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sebesar Rp 109.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 109.965.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk belanja bbm dan pelumas sebanyak 57 unit kendaraan.
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sebesar Rp 208.070.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.908.143,- sisa sebesar Rp. 5.162.357,- atau tercapai sebesar 97,52%. Output sub kegiatan ini pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala yang dikerjakan seperti pengecatan dan perbaikan gedung yang bocor (gudang Farmasi, Aula pertemuan, gedung Yankes & P2P, dan gedung SDK).
20. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.540.959.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.516.534.353,- sisa sebesar Rp. 24.425.367,- atau tercapai sebesar 98,41%. Output sub kegiatan ini Puskesmas dan Pustu yang direhab, sebanyak 5 Puskesmas dan 5 Pustu.

21. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 576.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.580.000,- sisa sebesar Rp 407.990.000,- atau tercapai sebesar 29,24%. Output sub kegiatan ini adalah sarana fasilitas Pelayanan kesehatan yang diadakan.
22. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 4.745.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.356.370.400,- sisa sebesar Rp. 388.629.600,- atau tercapai sebesar 91,81%. Output sub kegiatan ini prasarana dan pendukung faskes yang diadakan sebanyak 13 paket.
23. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.039.400,- sisa sebesar Rp. 25.960.600,- atau tercapai sebesar 71,15%. Dengan output sub kegiatan ini ada 3 dokumen data & Informasi Kesehatan (Profil kesehatan, Laporan Komdat online, Laporan SIP/SP3).
24. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.114.500,- sisa sebesar Rp. 3.885.500,- atau tercapai sebesar 91,37%. Dengan output sub kegiatan ini Puskesmas yang menggunakan Aplikasi SIKDA sebanyak 57 Puskesmas.
25. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet, alokasi anggaran sebesar Rp 76.989.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.375.455,- sisa sebesar Rp. 1.614.245,- atau tercapai sebesar 97,90%. Dengan output sub kegiatan ini tersedianya Perangkat SIK dan Jaringan Internet sebanyak 15 unit
26. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar, alokasi anggaran sebesar Rp 49.416.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.066.800,- sisa sebesar Rp 19.350.000,- atau tercapai sebesar 60,84%. Dengan output sub kegiatan ini tersedianya data SDM di 60 Pusk dan Labkesda sebanyak 61 dokumen.
27. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp 219.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp 219.909.800,- sisa sebesar Rp. 90.000,- atau tercapai sebesar 99,96%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah Nakes yang dinilai kinerja dengan pencapaian angka kredit dan uji kompetensi sebanyak 598 nakes.

Dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran pada Tahun 2021, Dinas Kesehatan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- (1) Adanya refocusing anggaran di Tahun 2021 ini masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan, hampir semua indikator masih belum mencapai target.
- (2) Masih terfokusnya pada penanggulangan kasus COVID-19, khususnya pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berjalan dengan optimal.
- (3) Dampak pandemi COVID-19 juga, berimbas kepada banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada Tahun 2021, sehingga semua kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan dengan baik.
- (4) Meningkatnya jumlah kematian ibu dan kasus balita gizi buruk di Kabupaten Cirebon.
- (5) Menurunnya jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan karena adanya penon-aktifan kepesertaan oleh Pusat (Kemensos).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- (1) Membuat panduan kegiatan/juknis pelaksanaan kegiatan di masyarakat pada masa pandemi yang mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, sehingga kegiatan dapat tetap berjalan.
- (2) Koordinasi dengan Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya dalam penanganan kasus covid-19 dalam penyediaan fasilitas pelayanan isolasi dan rujukan.
- (3) Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memverifikasi ulang peserta jaminan kesehatan (PBI) yang dinon-aktifkan.

C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 601.888.529.114,- dengan realisasi sejumlah Rp. 506.616.926.026,- atau 84,17%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 95.271.603.088,-. Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2021:

1. Non Urusan pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 20 (duapuluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 163.320.503.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 156.151.984.288,- sisa sebesar Rp. 7.168.519.012,- atau tercapai sebesar 95,61%.

2. Urusan Kesehatan pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 58 (limapuluh delapan) Sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 506.616.926.026,- dan terealisasi sebesar Rp. 506.616.926.026,- sisa sebesar Rp. 95.271.603.088,- atau tercapai sebesar 84,17 %.

Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM URUSAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			sisa
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,25	0,22	88,00				
1	Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	83.5 100.000 KH	112,21	-74,01	188.203.458.292	141.321.004.436	75,09	46.882.453.856
2	Menurunnya Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi	3.78 1000KH	2,24	101,60	707.297.000	582.294.300	82,33	125.002.700
3	Meningkatnya Status Gizi Balita	Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	85 Persen	70,13	82,51	1.481.383.050	1.308.478.325	88,33	172.904.725
4	Meningkatnya Status Gizi ibu hamil	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	80 Persen	83,83	104,79	1.481.383.050	1.308.478.325	88,33	172.904.725
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase UCI Desa	90.5 Persen	66,98	74,01	102.126.090.392	66.272.293.930	64,89	35.853.796.462

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			sisa
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	69 Persen	69,71	101,03	1.063.722.250	1.051.910.780	98,89	11.811.470
7	Meningkatnya persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	Persentase Desa ODF	49.76 Persen	70,05	140,77	636.438.640	632.618.640	99,40	3.820.000
8	Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	95 Persen	100,00	105,26	14.316.888.600	12.142.201.550	84,81	2.174.687.050
9	Tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Persentase UHC	97.5 Persen	91,66	94,01	121.207.428.520	119.373.670.744	98,49	1.833.757.776
10	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.32 Poin	99,40	99,40	170.664.439.320	162.623.974.996	95,29	8.040.464.324
						601.888.529.114	506.616.926.026	84,17	95.271.603.088

Ada 5 (lima) Program yang menunjang tujuan dan semua sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2021 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 163.320.503.300,00 dengan realisasi Rp. 156.151.984.288,00 (95,61%), anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 7.168.519.012,00 Program ini didukung dengan 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, ada efisiensi anggaran dikarenakan adanya aturan WFH dan WFO sehingga mengurangi penggunaan biaya listrik dan air kantor, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada efisiensi karena dibatasinya pertemuan sehingga ada efisiensi pada perjalanan dinas luar daerah untuk pegawai, dan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada dana yang tidak digunakan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tahun 2021 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 437.305.212.544,00 dengan realisasi Rp. 349.250.421.475,00 (79,86%), yang didukung dengan 4 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 88.054.791.069,00, yaitu pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti kegiatan lomba sekolah tingkat Kab, wilayah dan Propinsi dan Lomba dokter kecil tingkat Kabupaten, sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, dikarenakan adanya surat edaran dari dirjen pelayanan kesehatan Nomor : YM.02.02/VI/3099/2020 tentang penundaan akreditasi selama masa pandemi covid sehingga pelaksanaan survei akreditasi puskesmas pada Tahun 2021 tidak dilaksanakan, sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dikarenakan situasi pandemi Covid, kegiatan pertemuan audit kasus KIPI yang melibatkan lintas sektor terkait dan narasumbernya tidak dapat dilaksanakan, Sub kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, ada anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang tidak dapat direalisasikan karena pengajuan dari Puskesmas tidak sesuai dengan pedoman verifikasi, sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, dikarenakan banyak pertemuan yang tidak terlaksana akibat situasi pandemi Covid dan akomodasi Narasumber yang tidak digunakan (pertemuan dilaksanakan secara daring, sehingga dana tidak terserap).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tahun 2021 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 339.412.800,00 dengan realisasi Rp. 319.972.800,00 (94,27%) yang didukung dengan 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 19.440.000,00, yaitu pada sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar, dikarenakan ada kegiatan seleksi tenaga kesehatan teladan yang tidak dilaksanakan mengingat situasi Pandemi Covid.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2021 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 197.028.100,00 dengan realisasi Rp. 174.322.563,00 (88,48%) yang didukung dengan 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 22.705.537,00, yaitu pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pada rekening akomodasi narasumber tidak direalisasikan karena menggunakan narasumber lokal.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2021 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 726.372.370,00 dengan realisasi Rp. 720.224.900 (99,15%) yang didukung dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 6.147.470,00.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatannya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021, sehingga beberapa program/ kegiatan/sub kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi Tahun 2021.

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- (1) Adanya refocusing anggaran di Tahun 2021 ini masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan, hampir semua indikator masih belum mencapai target.
- (2) Masih terfokusnya pada penanggulangan kasus COVID-19, khususnya pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berjalan dengan optimal.
- (3) Dampak pandemi COVID-19 juga, berimbas kepada banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada Tahun 2021, sehingga semua kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan dengan baik.
- (4) Meningkatnya jumlah kematian ibu dan kasus balita gizi buruk di Kabupaten Cirebon.
- (5) Menurunnya jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan karena adanya penon-aktifan kepesertaan oleh Pusat (Kemensos).

Upaya Pemecahan masalah

- (1) Membuat panduan kegiatan/juknis pelaksanaan kegiatan di masyarakat pada masa pandemi yang mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, sehingga kegiatan dapat tetap berjalan.
- (2) Koordinasi dengan Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya dalam penanganan kasus covid-19 dalam penyediaan fasilitas pelayanan isolasi dan rujukan.
- (3) Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memverifikasi ulang peserta jaminan kesehatan (PBI) yang dinon-aktifkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap program dan kegiatan seperti yang diuraikan pada Bab III, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021. Dari 5 program, 21 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan, dengan 1 tujuan, 10 sasaran dan 11 indikator diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sebanyak 5 IK (45,45%) capaiannya sangat baik
2. Sebanyak 4 IK (36,36) capaiannya baik
3. Sebanyak 1 IK (9,09%) capaiannya cukup baik
4. Sebanyak 1 IK (9,09%) capaiannya tidak baik

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2021 yang berlandaskan pada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 601.888.529.114,- dengan realisasi sebesar Rp. 506.616.926.026,- atau 84,17%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 95.271.603.088,-. Belanja tersebut terbagi menjadi dua yaitu belanja Operasi sebesar Rp. 577.722.074.473,00 dengan realisasi sebesar Rp. 487.863.581.429,00 atau 84,45%, dan belanja Modal sebesar Rp. 24.166.454.641,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.753.344.597,00 atau 77,60% yang merupakan penunjang utama untuk pelaksanaan program. Serapan anggaran belanja ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020 yang hanya mencapai 83,54%.

Adanya Pandemi COVID 2019 membuat banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan, hal itu berpengaruh terhadap capaian kinerja maupun realisasi anggaran

Selanjutnya, untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, maka sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara